

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting pada balita di Indonesia merupakan fenomena yang umum terjadi. Sekitar 9 juta balita, atau 37% dari populasi, menderita *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas, 2013). Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2017), dikatakan *stunting* ketika tinggi badan seseorang sedikit di atas rata-rata tinggi badan anak atau orang dewasa pada umumnya. permasalahan gizi kronis yang terjadi pada balita dapat terjadi akibat pemasokan gizi yang terlalu rendah dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat terjadi ketika orang tua tidak memahami cara memberikan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak (Lestari, 2018) dalam (Putri et al., 2021).

Stunting bukan hanya masalah kekurangan tinggi badan saja namun yang menjadi perhatian ialah turunya kemampuan anak untuk belajar, mempunyai masalah mental, dan mempunyai penyakit-penyakit berbahaya. Penyelenggaraan infrastruktur dan lembaga yang mumpuni untuk memudahkan penyelesaian *stunting* mulai dari lingkungan yang bersih, sehat serta kerjasama antar pemangku kepentingan tetap terjaga. Seorang anak dikatakan menderita *stunting* apabila tinggi badan seusianya melebihi dua standar deviasi sesuai ketentuan Standar Pertumbuhan Anak *World Health Organization* (WHO). Anak penderita *stunting* cenderung memiliki kecerdasan otak yang rendah dan sistem imun yang lemah. Jangka Panjang anak yang mengidap *stunting* akan memiliki penyakit yang berbahaya seperti kanker. Permasalahan tersebut mengganggu aktifitas

kehidupannya karena stunting menyebabkan anak tidak aktif pada masa usianya. Maka dari itu peran dari semua *stakeholder* menjadi penting untuk pengimplementasian kebijakan yang diterapkan guna menekan angka *stunting*.

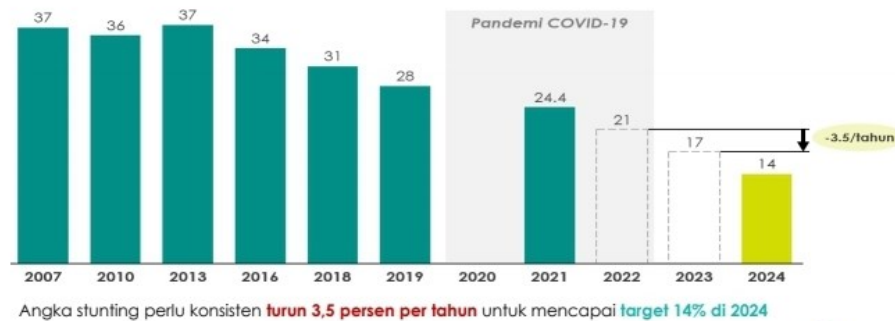
Status gizi merupakan indikator yang penting untuk menilai kondisi seseorang. Status gizi yang baik ialah hasil dari seimbangannya antara asupan nutrisi yang cukup dan kebutuhan nutrisi tubuh yang terpenuhi. Namun, status gizi seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Untuk itu diperlukannya klasifikasi status gizi untuk membantu mengidentifikasi kondisi gizi seseorang. Klasifikasi status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) yang umum digunakan untuk pengklasifikasian status gizi dengan pengukuran yang menggambarkan hubungan antar berat badan dan tinggi badan. Berdasarkan nilai IMT, status gizi seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, Gizi Kurang (*Underweight*): $IMT < 18,5$, Gizi Normal (*Normal Weight*): $IMT 18,5-24,9$, *Overweight*: $IMT 25-29,9$, dan Obesitas: $IMT \geq 30$. Klasifikasi status gizi berdasarkan IMT ini biasanya digunakan untuk orang dewasa sedangkan untuk anak-anak atau remaja, memerlukan kriteria yang berbeda sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin. *Z score* Indeks Pertumbuhan merupakan metode yang membandingkan nilai individu dengan nilai rujukan atau standar populasi yang sama. Dalam pengklasifikasian status gizi anak ialah panjang/tinggi badan menurut umur (P/U) dan berat badan menurut umur (W/U), serta berat badan menurut panjang/tinggi badan (W/P). berdasarkan *Z score* Indeks Pertumbuhan ada 4 kriteria yakni, Gizi Buruk (*Severely Wasted*): $Z\ score < -3$, Kurang Gizi: $Z\ score -3$ hingga -2 , Gizi Normal: $Z\ score -2$ hingga $+1$, Beresiko Obesitas: $Z\ score +1$

hingga +2, dan Obesitas: $Z\ score > +2$. Klasifikasi berdasarkan $Z\ score$ Indeks Pertumbuhan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi anak yang mengalami gizi buruk atau kurang. Indonesia kini masih mengalami permasalahan untuk kekurangan gizi yaitu gizi kurang-buruk, pendek (*stunting*), dan kurus (*wasting*) yang masih di tingkat angka tinggi bila dibandingkan dengan angka batas menurut *World Health Organization* (WHO). Anak usia di bawah lima tahun rentan terhadap kesehatan dan gizi yang menurut data global yakni WHO pada tahun 2012 jumlah penderita kurang gizi di dunia mencapai 104 juta anak, dan keadaan kurang gizi menjadi penyebab sepertiga dari seluruh penyebab kematian anak. Untuk itu, beberapa kriteria, termasuk berat badan menurut umur (BB/U), panjang badan menurut umur (PB/U), dan berat badan dan tinggi badan (BB/TB), digunakan untuk memastikan status nutrisi balita. Dalam upaya mengatasi masalah nutrisi, pemerintah tidak berhenti dan tegas melaksanakan berbagai cara untuk mempercepat dan menuntaskan penyempurnaan nutrisi serta menyoroti kebijakan dan terobosan yang tepat. Tentu saja melibatkan berbagai dan kesehatan intervensi sensitif yang dilakukan berupa aktifitas pada penduduk yang bisa berpengaruh terhadap status nutrisi (BAPPENAS, 2013) dalam (Wijhati et al., 2021). Melalui hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI mengumumkan prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4 % di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.

Gambar 1. 1 Prevalensi Stunting di Indonesia

Stunting menurun, namun perlu percepatan untuk mencapai target 14% di tahun 2024

% Angka stunting 2007-2021 dan target 2024:



Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 dan SSGI tahun 2019 dan 2021



Sumber: Kejar Target Stunting Turun Hingga 14%, Kemenkes Lakukan Pendekatan Gizi Spesifik (KEMENKES, 2022) yang ditulis oleh Redaksi Sehat Negeriku

(<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20221206/4041950/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik/>)

Menurut data gambar di atas prevalensi angka *stunting* di Indonesia pada masa pandemi covid di tahun 2021 mencapai 24,4% lebih sedikit 3,5% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2022 angka tersebut turun menjadi sekitar 21,6% yang diharapkan pada tahun selanjutnya angka tersebut akan terus menurun. Dengan melakukan pendekatan gizi sensitif yang akan mendampingi pendekatan gizi sensitif. Pendekatan gizi spesifik aberkaitan dengan evaluasi dan pendekatan masalah gizi pada sasaran intervensi yang diberikan kepada 1000 hari pertama keidupan, bayi, anak, remaja putri, ibu hamil, dan ibu melahirkan. Penguatan intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting menjadi target 14% pada tahun 2024.

Stunting menjadi masalah yang penting untuk di selesaikan walaupun tidak bisa hingga mencapai *zero stunting* angka *stunting* bisa ditekan di angka rendah. *Stunting* menjadi potensi mengganggu daya tahan sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingkat kesehatan. Melalui hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesai (SSGBI) menunjukkan bahwa penurunan angka *stunting* berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Walaupun angka *stunting* menurun, namun angka tersebut dinilai masih tinggi dari batas yang ditentukan oleh WHO yakni tidak lebih dari 20 persen. Lebih dari 50 persen bayi mengalami *stunting* hal ini yang membuat *stunting* menjadi hal yang serius untuk diperhatikan oleh pemerintah. Tingginya *stunting* di Indonesia mayoritas dari bayi yang lahir dengan normal akan tetapi nutrisi gizi tidak tercukupi sehingga menjadi *stunting*. Selain itu, menyiapkan kesehatan yang prima sebelum melaksanakan pernikahan menjadi salah satu penyebab *stunting* karena tidak melakukan prakonsepsi.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang disebutkan pada pasal 1 ayat 6 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang tepat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu akan tepat dengan keadaan yang terjadi di daerahnya serta lebih efektif dan efisien dalam mengimplementasikannya. Dengan diberlakukannya sistem Otonomi Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 maka setiap daerah akan sama terhadap kebijakan yang dibuat namun besaran kapasitas dari

kebijakan tersebut akan berbeda dalam membuat kebijakan penurunan stunting. Dengan adanya Otonomi Daerah ini pemerintah daerah akan lebih fokus kepada kebijakan yang dibuat untuk menekan angka stunting di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* berpedoman pada Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut terdapat strategi pendekatan dalam konvergensi pencegahan *stunting* dengan melakukan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah melalui lintas sektor seperti camat, kepolisian, TNI, Kades, Pendidikan, Kemenag, pengairan, BKKBN, dan Pertanian melalui program yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Tanggap *Stunting* (BTS). Strategi tersebut menjelaskan bahwasanya semua sektor ikut Langkah-langkah promotif dan preventif harus diimplementasikan untuk mengatasi masalah *stunting*. Peran dari pemerintah maupun kader yang ikut aktif turut memberikan informasi dan melakukan komunikasi baik formal maupun informal terkait masalah *stunting*. Media dalam berpartisipasi melakukan kampanye terkait Banyuwangi Tanggap Stunting di berbagai media sosial. Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari pemerintah desa dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting*.

Konvergensi sendiri dalam pencegahan stunting merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama untuk menyaring kelompok sasaran utama yang tinggal di desa untuk melakukan pencegahan *stunting*. Peran dari semua *stakeholder* di Kabupaten Banyuwangi harus maksimal untuk mencapai target yaitu Banyuwangi *Zero Stunting*. Berbeda dengan intervensi gizi spesifik, upaya rancangan (pencegahan) sensitif

dilaksanakan dengan berbagai macam cara untuk membangun bagian luar bidang kesehatan dan menyumbang lebih dari lima puluh persen terhadap intervensi anak stunting. Upaya penurunan prevalensi *stunting* yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi melalui gagasan terbaru dari Bupati Banyuwangi yaitu BTS (Banyuwangi Tanggap *Stunting*) merupakan sebagai wujud inovasi baru dalam menangani kasus *stunting* di Banyuwangi. Dalam peng gagasan program tersebut Bupati Banyuwangi menekankan ada 5 langkah yang harus dilakukan agar bisa menekan angka *stunting* yang diberi nama BU IPUK, yaitu merupakan singkatan dari, Bangun Kolaborasi, Upayakan secara maksimal, Identifikasi balita *stunting*, dan ukur secara berkala tumbuh kembang anak.

Untuk mendorong terjadinya konvergensi berbagai program prioritas termasuk BTS, maka pilar 3 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) dan Kementerian Dalam Negeri Stranas *Stunting* secara khusus ditujukan untuk memperkuat konvergensi program di pusat maupun daerah dengan mencakup 4 strategi yaitu, memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas pengelolaan, memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintah, dan membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, bentuk konvergensi menjadi penting untuk permasalahan stunting yang tidak menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja. Pemerintah desa sekalian itu ambil peran bersama lintas sektor camat, kepolisian, TNI, kades, pendidikan, kemenag, pengairan, BKKBN, pertanian dan lembaga non-pemerintah berperan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Berbagai program telah dianggarkan oleh Kabupaten Banyuwangi untuk menekan angka *stunting*. Kabupaten Banyuwangi juga telah mengirimkan makanan berprotein hampir sekitar 1.700 balita *stunting* dan ibu hamil setiap hari selama setahun. Kabupaten Banyuwangi menganggarkan 7 miliar untuk intervensi gizi spesifik seperti telur, ikan, dan ayam yang menyalurkannya ialah pedagang keliling yang sudah terdata oleh pemerintah. Pernyataan ini didukung dengan berita yang dimuat oleh BeritaBWI banyuwangi.go.id.

BANYUWANGI – “Dengan adanya inovasi ini, jumlah *stunting* di Banyuwangi berhasil diturunkan dari 20,1% di tahun 2021 menjadi 18,1% di tahun 2022. Prevalensi *stunting* di Banyuwangi sekitar 3,9% pada bulan penimbangan terakhir dan paling dinamis, serta perlunya komitmen dan kolaborasi lintas sektor terkait. Seperti sekolah-sekolah rutin untuk melakukan aktifitas fisik, sarapan bersama dengan gizi yang seimbang”.

(Sumber:

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita/cegah-stunting-banyuwangi-masifkan-pemberian-gizi-pada-remaja-putri> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 10.52 WIB)

Satu-satunya faktor penting untuk keberhasilan proses kolaboratif adalah komitmen para pemangku kepentingan yang ada. Komitmen juga membutuhkan kepercayaan bahwa tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan baik. Meningkatkan komitmen dalam proses kolaborasi, menjelaskan nilai keuntungan apa yang akan diperoleh dan bagaimana tujuan dapat memenuhi semua kepentingan Para *stakeholder* yang terlibat harus dapat mengembangkan pemahaman bersama selama proses kolaborasi. Untuk mengatasi masalah *stunting*, kita perlu berbagi pengetahuan tentang tujuan, misi, dan sasaran bersama, serta bahasa yang jelas dan strategis serta definisi yang jelas tentang masalah tersebut. Dalam situasi ini, diskusi kelompok tentang tujuan program sangat diperlukan. Selain itu, pada titik ini, sangat penting untuk menyebarkan

informasi dan pengetahuan tentang masalah *stunting* sehingga *stakeholder* yang terlibat dapat memperoleh pemahaman mendasar tentang masalah tersebut (Purnamasari et al., 2021)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* dengan melaksanakan 5 langkah untuk program Banyuwangi Tanggap Stunting. Terdiri atas 2 basis dan 3 pilar. Dua basis tersebut ialah melakukan kolaborasi dengan semua pihak, basis selanjutnya ialah mengupayakan secara maksimal agar Kabupaten Banyuwangi *zero stunting*. 3 pilar yang disebutkan di tiap lini ikut aktif melakukan identifikasi balita stunting (*by name, by address, dan by problem*). Selain itu memperbaiki masalah penyebab *stunting* seperti masalah perekonomian. Sebagaimana dilansir pada detik.com:

Banyuwangi - Di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Banyuwangi, Kamis (21/7/2022), pakta integritas ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa. Acara tersebut dihadiri oleh Sukaryo Teguh Santoso, Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Maria Ernawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Banyuwangi, para Kepala Puskesmas, dan berbagai pihak terkait. (Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6191803/percepat-penurunan-stunting-di-banyuwangi-bupati-ipuk-luncurkan-bts/> diakses pada tanggal 6 Juni 2023 16.37 WIB)

Berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak lembaga sektor publik, lembaga sektor swasta, serta organisasi masyarakat untuk ikut andil bekerja sama menekan angka *stunting*. Mengingat *stunting* di Kabupaten Banyuwangi masih menyentuh di angka sekitar 18% pada tahun 2022 menurut data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi. Tim Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dibentuk

sebagai hasil kolaborasi para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi curah pendapat, analisis, dan evaluasi stunting. Tim yang dibentuk terdiri dari tiga unsur, yaitu profesional, masyarakat, dan organisasi perangkat daerah terkait.

Berdasarkan pernyataan dari Katadata Media Network (2024) yang dikutip dari artikel databoks.katadata.co.id dengan judul Mayoritas Penduduk Kabupaten Banyuwangi pada 2023 Adalah Usia Produktif mengatakan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tercatat 1.780.105 jiwa per Desember 2023. Angka ini bertambah lebih tinggi dibanding Desember 2021 tercatat 1.718.462 jiwa. berdasarkan data aplikasi Elektronik- Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah Ibu hamil sebanyak 22.773 jiwa. Anak balita usia 0-59 bulan sebanyak 106.748 anak balita. Angka *stunting* di Kabupaten Banyuwangi untuk usia 0-23 bulan sejumlah 739 jiwa, usia 24-59 bulan sejumlah 1785.

Tabel 1. 1 Jumlah Stunting di Kecamatan Cluring pada Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	2022	2023
1	Cluring	561	393

Sumber: bts.banyuwangi.go.id data Banyuwangi Tanggap Stunting 2022 dan 2023

Berdasarkan tabel di atas diakses berasal dari laman resmi bts.banyuwangi.go.id yang diakses Kecamatan Cluring. Jumlah *stunting* di Kecamatan Cluring dihitung setiap Bulan Februari dan Agustus di Tahun 2022 mencapai angka 561 penderita *stunting*. Selanjutnya untuk Tahun 2023 jumlah stunting di Kecamatan Cluring mengalami penurunan sejumlah 393 namun angka tersebut masih dikatakan tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kecamatan

Cluring serta perangkat desa untuk membantu memperkecil angka *stunting* yang ada di Kecamatan Cluring dengan melibatkan semua sektor karena bentuk penanganan seperti *stunting* tidak dapat diselesaikan apabila hanya bertindak secara individu melainkan semua sektor harus ikut andil dalam menyelesaikan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Cluring Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah
1	Jumlah Penduduk	73.724
	Total	73.724

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel 1. 3 Data Ibu hamil dan Balita Kecamatan Cluring Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah
1	Bumil	1040
2	Bumil Risti	208
3	Balita 0-59 Bulan	4890

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 yang ada di atas bahwasanya untuk jumlah penduduk Kecamatan Cluring berjumlah 73.724 jiwa. Sedangkan pada tabel 1.3 di Kecamatan Cluring memiliki Ibu hamil sebanyak 1040 jiwa, Ibu hamil resiko tinggi berjumlah 208 jiwa, dan Balita usia 0-59 Bulan berjumlah 4890 jiwa. Berdasarkan data tersebut bahwasanya pemerintah Kecamatan Cluring memberikan fokus untuk menurunkan jumlah *stunting* di Kecamatan Cluring.

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Keluarga Berencana yang dimuat oleh laman web seblang.com

Banyuwangi, seblang.com – “Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Keluarga Berencana, berdasarkan data pada tahun 2022 jumlah penderita lama dan baru suatu penyakit pada jangka waktu tertentu rata-rata mencapai 20.1%. kasus *stunting* tertinggi di wilayah Kabupaten

Banyuwangi terjadi di Kecamatan Cluring yang prevalensi rata-rata mencapai 11.56%”.

(Sumber: <https://seblang.com/2023/01/27/kecamatan-cluring-tempati-peringkat-pertama-kasus-stunting-di-banyuwangi/> diakses pada tanggal 13 Desember 2023 15.58 WIB)

Dalam proses implementasi program Banyuwangi Tanggap *Stunting* yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi awal di Kecamatan Cluring memiliki permasalahan yang ditemukan yaitu komitmen dari lintas sektor (camat, koramil, pendidikan dll) berperan mengkoordinasi dan melakukan pemetaan lintas program dan sektor. Melakukan sosialisasi kebijakan dan aktifitas konvergensi pencegahan penurunan *stunting* secara lanjut. Seperti yang disampaikan oleh bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas UPTD Kedungwungu:

“Puskesmas bersama Lintas sektor (camat, polsek, Pendidikan dll) ikut membantu melakukan upaya penurunan *stunting* sesuai dengan instruksi bupati yang didasarkan oleh peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 untuk menjadi pedoman bagi semua sektor dan anggaran dialirkan untuk setiap desa dan puskesmas untuk memberikan fasilitas dan bantuan terhadap penderita *stunting* dan ibu hamil” (Wawancara pendahuluan pada 15 Mei 2023)

Organisasi profesi yang juga ikut serta dalam Tim Percepatan Penurunn *Stunting* (TPPS). Dalam hal ini organisasi yang dimaksud ialah organisasi dibidang kesehatan yang berperan untuk melakukan kegiatan pelayanan dibidang kesehatan terkait dengan *stunting*. Melakukan pembinaan dan intervensi spesifik. Organisasi bisnis privat berupaya dalam proses bisnis yang berkaitan dengan masalah *stunting* dengan menyalurkan bahan makanan berprotein yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada penderita *stunting*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala UPTD Puskesmas Kedungwungu:

“Organisasi profesionalnya saat ini merupakan satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang kesehatan saja. Di bidang tersebut, melakukan analisis masalah *stunting* dan melakukan perbaikan gizi. Selain itu, saya mulai

melakukan pemantauan dan evaluasi sektor secara keseluruhan untuk melakukan konvergensi *stunting*.” (Wawancara pendahuluan pada 15 Mei 2023)

Pemerintah berperan sebagai pengatur, yaitu sebagai pembuat kebijakan daerah. Dalam hal ini pemerintah bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dan program konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Memberikan informasi terkait kebijakan kepada pemerintah desa maupun kecamatan, meningkatkan koordinasi antara kebijakan dan semua pemangku kepentingan. Selain itu pemerintah harus memastikan aliran dana yang diberikan tersalurkan secara merata.

Setiap unsur memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing yang dipikul terkait masalah *stunting*. Sehingga tanggung jawab tersebut bisa dijalani secara maksimal dan bisa mencapai tujuan bersama-sama yaitu Kabupaten Banyuwangi Zero *Stunting*. Apabila salah satu dari pemangku kepentingan ataupun organisasi lainnya tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar maka akan terjadi kesenjangan antara kebijakan yang sudah dibuat dengan pengimplementasian dari program tersebut. Dalam pelaksanaan program Banyuwangi Tanggap *Stunting* (BTS) menemukan kendala yang dihadapi seperti *stakeholder* tidak bersungguh-sungguh ikut serta melakukan upaya penurunan *stunting*. *Stakeholder* tidak berintegritas dalam membantu organisasi profesi untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi langsung ke masing-masing *stunting* secara berkala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo selaku Kepala Puskesmas UPTD Kedungwungu:

“Semua masih bergantung dan berorientasi bahwa itu pekerjaan wong kesehatan. *Stakeholder* yang ikut serta dalam TPPS gak maksimal dalam

membantu melakukan upaya penurunan *stunting*, padahal sudah diinstruksikan oleh Bupati. Dan mereka hanya tau mateng dan membantu memberikan bantuan PMT saja, yo wes cukup ngunu kui. Mestinya mereka juga ikut serta melakukan *monitoring* dan evaluasi secara bergantian, jadi program itu bisa berjalan dan terintegrasi. Selama ini hanya puskesmas dan desa (kader kesehatan) yang turun langsung.” (Wawancara pendahuluan pada 15 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, komitmen dari semua sektor yang ikut serta sangat penting dalam melakukan program kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tanggung jawab dari masing-masing pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan pelaku. Integritas menurun karena masih berorientasi bahwasannya *stunting* itu permasalahan dibidang kesehatan saja. Sehingga ketika kebijakan sudah dibuat dan implementasi kebijakan dilapangan tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat terkait pengetahuan dari *Stunting* masih rendah dikarenakan dari faktor lingkungan, ekonomi dari kesadaran terkait makanan yang bergizi yang kurang serta daya beli masyarakat atau tingkat ekonomi orang tua yang rendah serta tingkat pendidikan dari orang tua yang kurang, serta pola asuh yang buruk terhadap anak yang memfokuskan untuk perihal yang lain selain makanan gizi.

Oleh karena itu penulis tertarik bagaimana upaya pemerintah kecamatan cluring setempat mengimplementasikan kebijakan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Melalui Banyuwangi Tanggap *Stunting* dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya untuk mencegah *stunting*, diketahui bahwa implementasi kebijakan Banyuwangi Tanggap *Stunting* di Kecamatan Cluring yang memiliki presentase *stunting* tertinggi di Kabupaten Banyuwangi masih belum

terlaksana dengan baik dikarenakan oleh berbagai faktor. Tidak optimalnya pelaksana kebijakan dengan kebijakan yang telah dibuat seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengingat terjadinya permasalahan di atas serta kesadaran dari masyarakat yang masih kurang, sehingga penulis berkeinginan untuk memberi judul **“Implementasi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Melalui Banyuwangi Tanggap *Stunting* di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* yang melalui Banyuwangi Tanggap *Stunting* di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?”

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana implementasi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Melalui Banyuwangi Tanggap *stunting* di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah ilmu mengenai implementasi Banyuwangi Tanggap *Stunting* di Kabupaten Banyuwangi.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna sarana penunjang Pendidikan dan bahan pembandingan bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis.

3. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber ilmu pengetahuan sebagai aspirasi dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting demi terwujudnya Banyuwangi *Zero Stunting*.